

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah studi yang mempelajari tentang hubungan antar negara, Dalam pengertian umum, istilah Hubungan Internasional mencakup semua hubungan di antara masyarakat nasional dan semua gerakan lintas batas negara. Ini menyiratkan proses pada waktu tertentu dan dalam konteks tertentu dimana masyarakat nasional menyesuaikan kepentingan bersama mereka. Ini adalah definisi yang luas dan tidak dapat menunjukkan ruang lingkup yang tepat dari subjek sebagai suatu disiplin. Daftar upaya lain untuk memasok efisiensi sama tidak efektifnya. Mereka yang percaya bahwa disiplin menyangkut hubungan antar Negara pada dasarnya mengabaikan fakta bahwa "Negara bukanlah blok monolitik dan dalam sebuah negara seringkali individu, kelompok atau kelompok ideologi adalah pembuat keputusan yang sebenarnya."

Hubungan Internasional juga tidak dapat didefinisikan sebagai "hubungan antara kelompok-kelompok yang berkuasa". Dalam hal itu, disiplin ini mengambil dimensi yang luas dan kebutuhan akan segera muncul untuk membedakan hubungan yang bersifat politis dari yang lain. "Definisi operasional" yang dikemukakan oleh Stanley Hoffmann membuat lebih sederhana. "Disiplin hubungan internasional berkaitan dengan faktor-faktor dan kegiatan yang mempengaruhi kebijakan eksternal dan kekuatan dari unit dasar di mana dunia dibagi. Definisi seperti ini menawarkan lebih banyak terhadap pendekatan yang kurang bisa diterapkan untuk studi Hubungan Internasional. Definisi ini menerima PBB sebagai subjek diskusi tetapi bukan Organisasi Meteorologi Dunia. Ini menunjukkan area penyelidikan tetapi tidak mengungkapkan esensi subjek.

Hubungan Internasional, sering disingkat HI adalah nama singkatan subjek akademis hubungan internasional. Alasan utama mengapa kita harus mempelajari HI adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem global. Setiap orang di muka bumi, dengan sedikit pengecualian juga merupakan warga negara dari salah satu negara tersebut dan sangat jarang lebih-lebih dari satu negara (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015:41).

Eksistensi ilmu hubungan internasional pada saat ini adalah sebagai ilmu yang benar – benar mandiri (a real distinct discipline), kemandirian ini menjadikan ilmu hubungan internasional menjadi “new comer” dalam deretan ilmu – ilmu sosial lainnya, usaha dalam memunculkan kemandirian ini merupakan proses keilmuan yang panjang (Darmayadi, 2015:10).

Hubungan internasional yakni studi yang mempelajari tentang interaksi yang dilakukan oleh berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, diantaranya negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah lokal, dan para individu. Hubungan internasional mempelajari perilaku aktor-aktor tersebut di dalam politik internasional (Ambarwati dan Wijatmadja 2016:4)

Studi hubungan internasional menempati bagian tersier dalam pengajaran ilmu-ilmu sosial. Inti dari bahasan studi ini sebenarnya meliputi tiga bentuk interaksi, yaitu: hubungan-hubungan antar negara; bukan negara atau hubungan-hubungan trans nasional yang melintasi perbatasan; dan beroperasinya sistem secara keseluruhan dimana dalam sistem ini negara dan masyarakat menjadi komponen utamanya (Ambarwati dan Wijatmadja 2016:5).

Dari George A. Lopez dan Michael S. Stohl mengartikan bahwa hubungan internasional sebagai suatu aktivitas manusia dimana para individu atau kelompok dari suatu bangsa/negara melakukan interaksi baik secara resmi atau tidak, dengan para individu atau kelompok dari

negara lain. Hubungan internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik secara langsung, melainkan juga transaksi ekonomi, militer, keamanan yang dikemas dalam bentuk diplomasi baik secara publik maupun privat. Oleh karena itu, studi hubungan internasional mencakup aktivitas yang sangat beragam, mulai dari perang, bantuan kemanusiaan perdagangan dan investasi internasional, pariwisata, hiburan, hingga olimpiade dan piala dunia (Ambarwati dan Wijatmadja 2016:7).

Secara lebih dalam, hubungan internasional dapat dikatakan sebagai kerja sama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan warga negara. Hubungan internasional dianggap penting guna menumbuhkan hubungan yang baik, dan kedamaian antar negara, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antar bangsa, saling memenuhi kebutuhan nasional masing-masing, memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, dan membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia.

Apabila suatu negara yang tidak mau mengadakan hubungan internasional dengan negara lain akan terkucilkan dalam pergaulan dunia. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut peneliti menguraikan pengertian hubungan internasional Menurut J.C. Johari, Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat. Selain itu, juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.

Selanjutnya, terdapat beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional, yaitu:

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

2. Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain yaitu dengan cara yang di kehendaki pelaku tersebut.

3. Kerja Sama

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerja sama internasional. Dalam suatu kerja sama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri.

4. Analisis Sistem

Analisis sistem dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dipisahkan, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005:29).

Seperti yang dinyatakan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan

Mochamad Yani, dalam bukunya:

“Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Selain itu, Hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan internasional” (Perwita dan Yani, 2005:7).

Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerja sama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional (Perwita dan Yani, 2005:5).

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi yakni seni serta praktek bernegosiasi oleh seorang (disebut diplomat) yang lazimnya menyubstitusi serupa negeri maupun puak. Kata diplomasi sendiri lazimnya langsung terkait dengan diplomasiuniversal yang lazimnya mengurus bermacam perihal kayak kebiasaan, ekonomi, serta perdagangan. umumnya, orang berpendapat diplomasi selaku teknik menerima keuntungandengan kata -kata yang halus.

Diplomasi yang paling sederhana serta tertua yakni diplomasi bilateral antara dua pihak serta biasanya merupakan tujuan dari kedutaan besar serta kunjungan kenegaraan. Contohnya yakni Persetujuan Perdagangan Bebas Kanada -Amerika antara Amerika Serikat dan Kanada. Jenis yang ada adalah diplomasi multilateral yang menyertakan banyak pihak serta mampu ditelusuri dari Kongres Wina. PBB adalah salah satu institusi diplomasi multilateral. Beberapa diplomasi multilateral berjalan antara negeri-negeri yang bersebelahan maupun dalam satu region serta diplomasi ini diketahui selaku diplomasi regional.

Diplomasi pernah sebagai salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negeri serta yakni medium pokok untuk mengatasi periodelah-periodelah universal supaya sanggup digapai suatu perdamaian negeri. Dengan sarana diplomasi itu negara melakukannya dalam rangka mencapai tujuannya serta menerima dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya. Diplomasi

yang yakni cara politik itu lebih-lebih dimaksudkan buat menjaga peraturan luar negeri suatu negara dalam pengaruhi peraturan serta perilaku negara negeri lainnya. Sebagai sebuah cara politik, diplomasi serta merupakan bagian dari upaya silih pengaruhi yang sifatnya amat luas dan berbelit-belit dalam tindakan internasional yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak internasional untuk menambah sarannya via saluran diplomatik.

Secara etimologis, kata “diplomasi ” berawal dari kata Yunani “diploun” bermakna melipat. Hal ini merujuk terhadap fenomena yang ada pada periode imperium Romawi dimana seluruhnya paspor yang mengatasi jalur negara dan tulisan-surat jalur dicetak pada piringan logam dobel , dilipat dan dijahit jadi satu. Surat jalan logam ini diucap “diplomas”. Pada era medio, seluruhnya surat legal negara yang digabungkan, ditaruh di arsip, yang berkorelasi dengan ikatan universal diketahui dengan julukan “diplomaticus” maupun “diplomatique”. Siapapun yang berkorelasi dengan surat-surat itu dipandang selaku milik “res diplomatique” maupun “bisnis diplomatik”. Dari masa ke masa kata “diplomasi” dihubungkan dengan manajemen ikatan internasional dan siapapun yang ikut mengaturnya didapati sebagai “diplomat”.

Menurut Ernest Satow : kata diplomasi pertama kali dipakai Burke untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melaksanakan hubungan internasional dan perundingan di tahun 1796. Burke serta memakai istilah pertama kali “lembaga diplomatik” pada tahun yang sama. Istilah “servis diplomatik” dalam arti simpangan servis negara yang sediakan personil-personil misi tetap di luar negeri dijumpai dalam “Annual Registrar tahun 1787”.

Menurut “Random House Dictionary” diplomasi diartikan sebagai “Tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negaranegara; seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut ;

kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang, dengan demikian ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam”.

Menurut Sir Ernest Satow “*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent states.*” Yang bermakna diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka. Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan negara-negara pengikutnya atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negaranegara dengan cara damai”.

2.1.3 Perang Konvensional

Perang konvensional adalah perang dimana dua negara berdaulat melakukan operasi militer melawan satu sama lain dalam konflik terbuka dan menggunakan taktik militer secara “*open confrontation*”. Jika dibandingkan dengan konsep perang non-konvensional yang hanya sebatas menggunakan taktik “*hit and run*” maka perang konvensional dipertarungkan dalam skala yang lebih besar,

Dengan menggunakan definisi “perang konvensional” yang mencakup semua peperangan kecuali perang menggunakan senjata nuklir dan melibatkan kekuatan-kekuatan yang tidak secara khusus atau diberi label pasukan operasi khusus. Definisi Glosarium Geografi menambahkan penjelasan lebih lanjut untuk istilah perang konvensional khususnya; operasi tempur besar diarahkan untuk menguasai wilayah, penduduk dan sumber daya. Definisi perang nonkonvensional sebagaimana didefinisikan oleh JP 1-02 mencakup kata operasi militer dan kata “combat” di mana saja dalam mendefinisikan perang non konvensional. Didasarkan dari “*A Tentative Manual For Countering Irregular Threats An Updated Approach to Counterinsurgency*” yang dibuat oleh United States Marine Corps membahas istilah perang non konvensional yang menyatakan, “istilah non konvensional digunakan dalam arti luas dan

inklusif untuk merujuk pada semua jenis metode kekerasan non-konvensional yang digunakan untuk melawan kemampuan tradisional lawan.” Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah perang tidak teratur mencakup peserta negara dan non-negara yang ingin mengusir atau mengurangi otoritas pemerintah lokal atau luar.

2.1.4 Perang Informasi dan Cyber

Operasi komunikasi dan informasi strategis memainkan peran penting dalam strategi AS dan Rusia selama Perang Dingin, namun kekuatan kampanye ini hilang setelah konflik berkurang. Manuver Rusia di Ukraina masih mengingatkan pada taktik penipuan operasionalnya - Maskirovka - selama Perang Dingin. Komponen utama perang informasi Rusia di Ukraina adalah komunikasi online yang disebarluaskan oleh pejabat Rusia, jurnalis, dan sumber media untuk mempromosikan pandangan pro-Rusia tentang konflik tersebut. Strategi ini merupakan perpanjangan dari kebijakan media domestik Rusia. Internet adalah salah satu dari sedikit jalan yang tersisa untuk mengekspresikan perbedaan pendapat populer di Rusia, karena televisi hampir secara eksklusif dikendalikan oleh negara dan outlet umum untuk pemerintahan Putin. Akibatnya, pemerintah Rusia banyak berinvestasi dalam menganalisis dan mempengaruhi saluran media online. Melawan Ukraina, Rusia mendukung jurnalis, blogger, dan individu dalam jaringan media sosial untuk menyiarkan narasi pro Rusia. Dalam satu kasus, Rusia membayar satu orang untuk memiliki beberapa identitas web yang berbeda. Salah satu aktor di St. Petersburg menyampaikan bahwa ia berperan sebagai tiga blogger berbeda dengan sepuluh blog, sekaligus mengomentari situs lain. Orang lain dipekerjakan untuk hanya mengomentari berita dan media sosial setiap dua belas jam. Menariknya, online media pro-Rusia juga meniru sumber anti-Rusia. Situs web Ukrainskaya Pravda adalah versi pro-Rusia dari situs berita populer Ukraina *Ukrainska Pravda*. Sumber-

sumber pro-Rusia ini akan mengomunikasikan narasi palsu tentang peristiwa aktual, seperti menyangkal kehadiran militer Rusia di Ukraina atau menyalahkan Barat karena melakukan perang informasi ekstensif melawan Rusia. Contoh lain adalah penyebaran gambar yang menggambarkan kolom pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina ke Rusia, padahal sebenarnya mereka adalah lalu lintas harian antara Ukraina dan Polandia. Sejalan dengan ini, kehadiran web pro-Rusia menyesatkan warga Ukraina, jurnalis, dan pengamat konflik lainnya yang mencari sumber informasi yang dapat dipercaya.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy memimpin perang ini lewat outlet berita dan sosial media. Dengan latar belakangnya sebagai artis, Zelenskyy mengetahui bagaimana media massa dapat membangun atau merubah pandangan masyarakat sehingga Zelenskyy menggunakan media massa sebagai senjata utama dalam konflik ini. Zelenskyy membuat setiap outlet media barat bersimpati dengan mengantagonisasi Putin karena telah menginvasi secara terbuka. Dengan banyaknya video Zelenskyy yang ia buat sendiri untuk menampilkan bagaimana ia memimpin dan bertarung dalam media massa dengan format *selfie* yang sedang umum di kalangan influencer sosial media, video ini dilihat oleh 3 juta orang dalam satu jam dan membawa opini internasional terhadap konflik ini jika dibandingkan dengan aneksasi Crimea di tahun 2014 yang hanya diketahui oleh outlet berita semata. Dengan adanya sosial media ini, Zelenskyy bisa membawa banyak orang untuk melihat Ukraina sebagai negara yang benar benar tertindas oleh negara yang lebih besar sedangkan respon dan upaya russia sendiri untuk perang cyber ini adalah dengan menyerang beberapa situs situs pemerintahan ukraina saat awal awal invasi berlangsung. Dan hingga sekarang, serangan cyber rusia mengarah pada perusahaan listrik di ukraina untuk melemahkan infrastruktur di ukraina.

Di bulan Juni sendiri, rusia sudah memata-matai 42 negara sekutu Ukraina dengan 29% tingkat kesuksesan sejak perang dimulai karena banyaknya negara yang mendukung Ukraina,

dan yang menjadi sasaran utamanya adalah Amerika Serikat dan Polandia sebagai pemasok bantuan utama pada Ukraina. Menurut Microsoft, pertahanan cyber Ukraina lebih kuat dibandingkan dengan serangan dari Rusia dalam serangannya terhadap perusahaan-perusahaan di Ukraina. Serangan Rusia memiliki beberapa cara utama, pertama, dengan serangan cyber terhadap infrastruktur penting untuk memfasilitasi konflik militer, lalu menggunakan perang *hybrid* sebagai strategi untuk mengganti perang dalam jangka panjang dan serangan lebih sedikit dengan menggunakan teknik lain seperti disinformasi agar tidak terlihat melakukan aksi militer langsung tapi hanya melemahkan pertahanan musuh perlahan. Lalu, serangan siber juga digunakan sebagai sinyal ancaman saat suatu negara menjadi sedikit agresif terhadap Rusia

Invasi Rusia tahun 2022 menciptakan kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak penggunaan serangan siber Rusia di masa perang. Ini juga memungkinkan analisis untuk lebih memahami strategi serangan cyber Rusia secara lebih luas. Mengawasi hubungan antara serangan siber dan konteksnya dapat memberikan, di masa depan, petunjuk tentang niat Rusia. Ini juga dapat membantu para ahli pertahanan melawan ancaman di tempat pertama. Mengingat bahwa Rusia dengan sengaja menggunakan serangan cyber untuk mengganggu negara-negara tanpa memprovokasi respons bersenjata, Amerika Serikat perlu menemukan cara untuk menanggapi serangan ini tidak hanya selama perang penembakan (seperti yang terjadi selama konflik Ukraina), tetapi juga untuk yang kurang sering, tetapi juga serangan gigih yang merupakan bagian dari perang *hybrid* Rusia yang sedang berlangsung melawan Barat

2.1.5 Non-state actor

Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Rusia ini banyak dilakukan oleh *non-state actor* di Rusia yang melakukan serangan secara anonim lewat cyberspace dan sudah menjadi senjata andalan Rusia dalam perang cyber karena kebanyakan hacker terbaik berasal dari Eropa Timur hingga biasanya di sewa oleh negara lain untuk melakukan serangan. Hacker dari Rusia

sendiri didukung oleh negara karena melihat potensi dari komunitas-komunitas hacker seperti menurut David Smith

“Russia adalah negara ekonomi ekstraktif khas yang masih menikmati manfaat dari sistem pendidikan soviet yang cukup bagus dengan kekayaan besar yang terkonsentrasi di beberapa orang saja sementara orang lain masih banyak belajar dalam matematika, sains dan komputer sedang mencari pekerjaan dan menghasilkan industri *botnet-for-hire* yang berkembang”

Alasan mengapa Rusia bergantung pada proxy cyber ada dua. Pertama, harganya hemat. Proxy membutuhkan sedikit dalam cara dukungan teknis. Dalam banyak insiden, peretas hanya perlu diberikan daftar target dengan vektor serangan dan kemudian dilepaskan. Peretas juga dapat dimobilisasi secara relatif cepat, dan dibubarkan ketika mereka tidak lagi diperlukan. Para peretas - peretas politik/nasionalis, yang Rusia miliki banyak - akan sering bekerja secara gratis, asalkan masalah tersebut sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kedua, peretas sangat ideal untuk beroperasi di zona abu-abu peperangan informasi karena mereka memberikan tingkat anonimitas tambahan untuk Kremlin, yang semakin memperparah masalah atribusi yang terkait dengan ruang maya. Bahkan investigasi forensik yang luas jarang menghasilkan bukti keras yang dapat dikaitkan dengan komputer pemerintah atau alamat IP terkait. Dari perspektif pencegahan atau kompetensinya, hasilnya sangat ideal untuk Moskow, karena musuhnya mengharapkan keterlibatan pemerintah Rusia, tetapi mereka biasanya tidak memiliki bukti pasti untuk meminta Kremlin untuk memperhitungkan tindakannya. Seperti skema raket perlindungan gangster klasik, Kremlin dapat mengingkari tindakan senjata-untuk-disewa dengan mengedipkan mata, sementara dengan gelap mengisyaratkan bahwa lebih banyak hal yang dapat "pecah" kecuali musuhnya membayar dan berperilaku.

Dan salah satu proxy cyber yang terhitung bagus adalah Troll internet karena dapat digunakan sebagai alat yang lebih terbuka, tetapi masih tidak dapat diselesaikan untuk mendiskreditkan informasi Anti Rusia di Internet dan mendorong sudut pandang pro-pemerintah. Pada 2012, WikiLeaks menerbitkan data dan dokumen yang disediakan oleh

kelompok peretas, Anonim, yang memberikan bukti bahwa pemerintah Rusia, dengan persetujuan Putin, secara langsung membayar untuk tim troll profesional.⁵⁵ Praktik ini berakar pada kebijakan domestik Rusia. Selama awal dan pertengahan 2000-an, Internet menyediakan platform untuk oposisi politik Rusia untuk mengeluarkan pesannya. Pemerintah, yang memiliki minat dalam membatasi media untuk pidato oposisi, berusaha mengendalikan akses dan penggunaan internet oposisi. Namun, dengan cepat menjadi jelas bahwa upaya seperti itu tidak akan berhasil. Kremlin menghitung bahwa, jika tidak dapat mengendalikan apa yang diletakkan lawan politik di internet, maka pemerintah akan mencoba untuk keluar, atau mengalahkan, pesan oposisi dengan kampanye pesan pro-Kremlin.

Berikut adalah contoh dari jasa yang disediakan oleh *non-state actor*

1. *Organization of distributed denial of service (DDoS) attacks*
2. *Testing malware for antivirus detection*
3. *“Packing” of malware (changing malicious software with the help of special software (packers) so that it is not detected by antivirus software)*
4. *Renting out exploit packs*
5. *Renting out dedicated servers*
6. *VPN (providing anonymous access to web resources, protection of the data exchange)*
7. *Renting out abuse-resistant hosting (hosting that does not respond to complaints about malicious content and, therefore, does not disable the server)*
8. *Renting out botnets*
9. *Evaluation of stolen credit card data and services to validate the data.*

2.1.6 Perang Cyber dalam Hukum Internasional

Dari konflik di Ukraina. Tindakan Rusia telah mengukir kontur baru untuk konflik yang tidak memetakan dengan sempurna untuk konsep dan aturan yang ada untuk peperangan dan pertahanan. Norma dan undang-undang yang ada untuk serangan bersenjata didasarkan pada penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan dan kekuatan fisik. Ini harus disesuaikan, jika tidak diubah, untuk konflik dunia maya. Upaya untuk mendefinisikan kembali kekerasan dan memaksa untuk memasukkan berbagai kemungkinan tindakan dunia maya (seperti upaya Rusia dan Cina di PBB untuk mendefinisikan informasi sebagai senjata sejauh ini memperkenalkan lebih banyak ambiguitas daripada kejelasan. Informasi jelas bukan senjata, tetapi definisi minimalis yang menekankan efek kinetik juga tidak memadai dalam menangkap berbagai efek cyber.

Oleh karena itu, aturan dalam konflik cyber akan menjadi tantangan bagi hukum internasional yang sudah ada karena hingga sekarang masih tidak ada persetujuan diantara negara-negara untuk mengaplikasikan hukum internasional dalam konflik cyber karena penerapan ketentuan spesifik Piagam PBB, dan khususnya penerapan Pasal 2/4 (meninggalkan penggunaan kekuatan) dan Pasal 51 (hak untuk membela diri). Salah satu pertanyaan untuk pengembangan norma -norma lebih lanjut untuk konflik dunia maya adalah apakah mungkin untuk bergerak melampaui norma -norma yang tertanam dalam piagam PBB dan perjanjian internasional yang mengatur perilaku peperangan dan konflik bersenjata, untuk mengatasi aspek baru peperangan ini dan untuk menciptakan norma -norma Itu mengatur tindakan non-kinetik. Salah satu jalan yang mungkin untuk kemajuan adalah memperluas komitmen piagam untuk menghindari tindakan yang mengancam integritas teritorial atau independensi politik suatu negara (ditemukan dalam Pasal 2/4 dan 51) untuk secara eksplisit mencakup tindakan cyber.

Jika harus dicontohkan maka kurang lebih seperti ini: Misalkan seseorang di dalam wilayah Jepang, atas permintaan pemerintah A.S., mengkompromikan fungsionalitas semua stasiun jaringan listrik di rusia, yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan Ukraina. Pemadaman listrik di rusia selama tujuh jam yang menghentikan kelancaran fungsi semua sektor negara dengan referensi khusus ke fasilitas perawatan kesehatan dan infrastruktur sipil penting. Penyerang adalah salah satu pakar cyber top di dunia, dan dengan demikian, serangan itu kemungkinan telah dilakukan tanpa meninggalkan petunjuk tentang asal mula serangan yang sebenarnya. Contoh ini menggambarkan kekhawatiran pada konflik “bersenjata” dalam domain cyber, yaitu, masalah atribusi seperti mengidentifikasi sumber serangan dan “siapa yang melakukannya? Lebih tepatnya“ siapa yang “harus disalahkan”

Pasal 2 (4) Piagam PBB, yang tidak diragukan lagi mencerminkan hukum internasional, 34 menetapkan norma preskriptif dasar dari badan hukum ini: “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial tersebut atau independensi politik negara bagian mana pun, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan PBB. " Piagam ini berisi dua pengecualian untuk larangan umum - penggunaan kekuatan yang diizinkan oleh Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 42 dan pertahanan diri sesuai dengan Pasal 51. Pasal 2 (4) dan analog adatnya hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan oleh negara atau yang disebabkan oleh mereka sesuai dengan hukum tanggung jawab negara; Ia tidak memiliki pengaruh pada tindakan aktor non - negara seperti kelompok teroris. Sejak munculnya operasi cyber, negara bagian dan cendekiawan telah berjuang untuk mendefinisikan ambang batas di mana suatu tindakan menjadi "penggunaan kekuatan." Sama seperti permusuhan kinetik klasik yang memenuhi syarat, demikian juga operasi cyber yang menyebabkan kerusakan atau cedera. Dilema interpretatif terletak pada penerapan norma untuk operasi cyber yang, meskipun tidak melepaskan kekuatan destruktif atau merugikan, tetap menghasilkan konsekuensi non-fisik

yang parah. Apakah operasi semacam itu memenuhi syarat sebagai penggunaan kekuatan yang, dengan tidak adanya pembenaran hukum, melanggar larangan?

ICJ telah menolak interpretasi sempit "penggunaan kekuatan" yang membatasi istilah untuk pekerjaan gaya kinetik atau operasi non-kinetik yang menghasilkan efek yang sebanding. Di Nikaragua, pengadilan berpendapat bahwa persenan dan pelatihan pasukan gerilya negara yang terlibat dalam permusuhan terhadap negara lain yang memenuhi syarat sebagai penggunaan kekuatan, posisi yang sejak itu diterima secara luas.³⁸ Logika Holding mengarah pada kesimpulan bahwa non-non-diterima Operasi cyber yang merusak kadang-kadang dapat sama dengan penggunaan kekuatan. Misalnya, memberikan malware kepada kelompok pemberontak dan melatih para anggotanya untuk menggunakan malware itu secara destruktif tampaknya memenuhi syarat.

2.1.7 Perang Hybrid

Di dalam konflik zaman sekarang, kekuatan konvensional dan kekuatan siber berbaur di "ruang pertempuran" yang sama, di mana mereka dikombinasikan secara operasional dan dicampur secara taktis. Hebatnya, komponen gaya yang tidak konvensional menjadi dominan. Medan perang belum tentu teritorial, tetapi itu tentu saja merupakan sosial. Kombinasi ancaman hibrida kontemporer, berbagai elemen mematikan dan non-mematikan-hasil globalisasi, penyebaran teknologi militer, dan revolusi informasi-secara kualitatif berbeda dari bahaya yang kurang rumit yang hanya ditimbulkan dari pasukan yang tidak konvensional atau paramiliter.

Saat ini, secara prinsipnya, perang *non-hybrid* tidak lagi terjadi, dan konflik yang menyebabkan konfrontasi bersenjata dimulai jauh sebelum perang secara resmi diakui dan berakhir lama setelah penandatanganan Perjanjian Damai. Mereka mulai dalam bentuk perang informasi, tindakan pengalihan, dan perang gerilya, yang juga merupakan dasar perencanaan

militer modern di tingkat staf umum Rusia. Peperangan modern adalah gaya konflik di mana seseorang harus menyerang koneksi tertentu, elemen kontrol, dan bagian utama dari penumpukan musuh. Untuk memenuhi tujuan, elemen yang berbeda, yang tampaknya tidak terhubung dalam ruang dan waktu, digunakan secara bersamaan. Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Gerasimov mengatakan pada tahun 2016 bahwa Perang Modern disiapkan dan didukung oleh informasi yang mempengaruhi, termasuk penggunaan Internet, untuk mengubah kesadaran massa; Ini kadang-kadang dapat menggantikan intervensi bersenjata. Peperangan yang dilakukan terutama oleh aktor non-negara yang didukung oleh cara yang tampaknya tidak langsung cenderung menjadi norma baru dalam perang abad ke-21 dan lingkungan keamanan masa depan.

NATO lebih suka istilah '*hybrid warfare*' untuk merujuk pada bentuk konflik 'baru' Rusia di Ukraina. Pilihan ini, bisa dibilang, adalah titik balik yang paling penting dalam evolusi konsep '*hybrid warfare*'. Pertama, penggunaan dan popularitas istilah '*hybrid warfare*' meningkat secara dramatis dalam debat militer dan strategis Barat. Kedua, karena kegiatan Rusia di Ukraina tidak sepenuhnya sesuai dengan konseptualisasi sebelumnya, makna '*hybrid warfare*' menjadi sasaran peregang konseptual sekali lagi. Secara singkat, Rusia mencapai tujuan politiknya di Ukraina dengan menggunakan campuran alat-alat non-kinetik termasuk serangan dunia maya, propaganda, disinformasi, paksaan ekonomi, dan tekanan diplomatik, dan metode militer seperti melakukan operasi rahasia dan memberdayakan pejuang proksi. Selain itu, Rusia secara sistematis membantah keterlibatannya di Ukraina. Jadi, apa yang disebut '*hybrid warfare*' di Ukraina tidak hanya terdiri dari kombinasi elemen reguler dan tidak teratur atau kombinasi alat militer dan non-militer tetapi juga tindakan dan penipuan rahasia. Jadi, karakteristik utama dari kampanye subversif Rusia di Ukraina menciptakan ambiguitas dan memungkinkan penyangkalan yang masuk akal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, '*model hybrid of warfare*' sebagian besar terkait dengan apa yang disebut 'doktrin Gerasimov' yang

menekankan perbedaan yang kabur antara perang dan perdamaian. Dengan demikian, konsep *hybrid warfare* umumnya ditandai oleh kegiatan sub-threshold termasuk metode kinetik dan non-kinetik di kedua makalah ilmiah, dan dokumen kebijakan/strategi lembaga-lembaga barat. Sebenarnya, pemahaman '*hybrid warfare*' ini tampaknya merupakan koktail dari versi konseptual sebelumnya. Yaitu, ia menangkap hampir semua kategori yang termasuk dalam literatur '*Hybrid Warfare: Conventional and Unconventional, Military and Non-Military*'. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, formulasi ini memberikan penekanan khusus pada penyangkalan yang masuk akal dan gagasan tetap menjadi ambang batas tindakan perang yang langsung, dan dengan demikian, merupakan penyimpangan dari konseptualisasi sebelumnya dari '*hybrid warfare*'.

Pada tahun-tahun berikutnya, konsep 'perang hybrid' terus berkembang dan mendapatkan makna baru dalam wacana strategis Barat. Ini karena politisi Barat, cendekiawan, paka-pakar, dan media sering digunakan istilah 'perang hybrid' hanya untuk merujuk pada tindakan subversif tanpa kekerasan seperti serangan dunia maya, paksaan ekonomi, kampanye disinformasi, ikut campur pemilu, dan cairan pemilihan Baru -baru ini persenjataan migran (Der Spiegel 2016). Jelas, versi konseptual perang *hybrid* ini mewakili keberangkatan ekstrem dari pendekatan asli ke peperangan hibrida yang awalnya telah dimasukkan dalam leksikon militer Barat sebagai konsep medan perang-sentris.

Perang *hybrid* menggunakan berbagai kegiatan, sumber daya, program, dan aplikasi militer yang komprehensif dan sangat beragam, yang dirancang sedemikian rupa untuk mengarah pada maksimalisasi pengaruh politik dan ekonomi persuasif tanpa kekerasan, untuk mereformasi pemerintah atau kelompok yang bermusuhan, serta untuk membalikkan ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi, yang merupakan karakteristik negara-negara gagal atau di ambang kehancuran. Ini juga mencakup spektrum penuh kemampuan intelijen militer, senjata tidak konvensional (termasuk pertempuran yang tidak mematikan), dan peralatan

pendukung, yang siap digunakan kapan saja (Colonel Margaret S. Bond, *United States Army Reserve*)

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1